

CODING MASUK DALAM KURIKULUM

Disdikpora Tunggu Arahan dari Pusat

YOGYA (KR) - Pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Salah satu inisiatif terbaru datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mendorong agar pelajaran coding dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia.

Perlu diketahui coding adalah komputer atau perangkat elektronik lainnya. Pengenalan coding sejak dini diharapkan bisa membantu generasi muda Indonesia mengembangkan keterampilan di bidang teknologi dan informasi.

"Kami menyambut baik rencananya ini. Karena langkah ini sejalan dengan perkembangan kebutuhan era digital dan karakter generasi sekarang yang dikenal sebagai digital natives. Dimana

anak-anak sejak kecil sudah terbiasa menggunakan perangkat teknologi. Jadi akan lebih baik jika sejak usia dini anak-anak mulai dikenalkan dengan coding. Tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tapi juga memahami bagaimana teknologi itu dibuat," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Dr Didik Wardaya di Yogyakarta, Rabu (13/11).

Didik mengatakan, penambahan pelajaran tentunya memerlukan se-

jumlah persiapan. Terutama dalam hal penyediaan tenaga pengajar yang kompeten. Untuk itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau nanti coding menjadi pelajaran wajib, tentu butuh guru khusus. Yaitu guru IT yang sudah memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Jadi memerlukan persiapan baik dari segi jumlah guru maupun kompetensinya. Karena coding bukan hanya tentang pengenalan teknologi, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan berpikir kritis dan logika pada siswa. Mengingat coding membantu siswa melatih kemampuan analisis, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah, dan berpikir sistematis.

"Keterampilan ini memiliki potensi luas di berbagai bidang selain teknolo-

gi, seperti matematika, sains, hingga seni dan desain. Jadi kebijakan ini akan bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak akan bergantung pada kesiapan masing-masing daerah dan sekolah, terutama dalam hal infrastruktur dan kurikulum," ungkapnya.

Lebih lanjut Didik menambahkan, penerapan pelajaran coding di sekolah tidak hanya bertujuan menjadikan siswa lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tetapi juga sebagai langkah untuk mencetak generasi muda yang mampu bersaing di tingkat global. Pasalnya beberapa negara seperti India, Jepang, dan Korea Selatan bahkan sudah lebih dulu memasukkan coding dalam kurikulum mereka. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemam-

puan digital Indonesia dan membangun ekosistem teknologi yang kokoh untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Saat ini kita sedang menunggu arahan kebijakan dari pusat. Kita akan siap menyesuaikan, tetapi perlu disesuaikan juga dengan kesiapan tenaga pengajar dan fasilitas yang ada di sekolah," imbuhnya.

Didik menjelaskan, sebenarnya beberapa sekolah di Yogyakarta sudah mulai memperkenalkan pelajaran dasar kode dan pemrograman, meskipun belum dijadikan mata pelajaran wajib. Di beberapa SMP, misalnya, siswa telah mendapatkan pengenalan tentang algoritma dan logika dasar yang menjadi pondasi dalam dunia coding. (Ria)f

MENUJU KOTA LAYAK ANAK PARIPURNA

Ruang Terbuka Hijau Disinergikan Taman Bermain

YOGYA (KR) - Keberadaan ruang terbuka hijau publik (RTHP) di Kota Yogya sangat potensial untuk disinergikan dengan taman bermain anak. Upaya itu sekaligus untuk mewujudkan Yogya sebagai Kota Layak Anak (KLA) paripurna.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Sri Isnayanti Sudiasih, pihaknya mendapatkan catatan dan rekomendasi hasil audit standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. "Rekomendasi terkait ruang bermain ramah anak itu secara khusus untuk Taman Pintar. Tetapi itu juga menjadi acuan nantinya untuk direplikasi dan diterapkan di RTHP di Kota

Yogya. Baik itu yang akan dibuat ataupun yang saat ini sudah ada," ungkapnya, Rabu (13/11).

Selama ini Taman Pintar memang menjadi salah satu ruang edukasi sekaligus taman bermain yang sangat digemari kalangan anak-anak. Sarana dan prasarana juga terus disesuaikan sesuai standar ruang bermain ramah anak. Terutama yang bertujuan untuk mengakomodasi kegiatan anak agar bisa bermain dengan aman dan nyaman.

Menurut Sri Isnayanti, ruang bermain ramah anak menjadi hal penting dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Begitu juga sebagai langkah untuk menjadikan Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak secara paripurna.

Sejalan dengan itu Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Kota Yogya Retno Yuliyani, menyatakan pihaknya selalu berbenah dan membuka diri ter-

hadap setiap masukan kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, standarisasi ruang bermain ramah anak tidak hanya menilai ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah anak tapi juga bagaimana lingkungan sekitar dibangun dengan memperhatikan unsur edukasi dan interaksi dengan anak. Begitu juga dengan aspek inklusi untuk memberikan hak yang sama bagi anak disabilitas.

"Interaksi anak dengan hewan seperti ikan dan burung di Taman Pintar sudah ada, yang belum itu dengan tumbuhan. Sementara untuk wahana yang bisa diakses anak disabilitas beberapa sudah ada. Kemudian unsur edukasi terkait sampah ini juga dikembangkan, yang tadinya hanya ada tiga jenis bak sampah yaitu organik, anorganik dan berbau, sekarang menjadi lima ditambah bak sampah bahan berbahaya beracun atau B3 dan residu," paparnya.

(Dhi)-f

LPUMKM PDM Kota Yogya Majukan UMKM di Lingkungan Muhammadiyah



KR-Istimewa

Herry Zudianto menyampaikan materi dalam sarasehan UMKM.

YOGYA (KR) - Lembaga Pengembang (LP) UMKM Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta terus memajukan sektor UMKM. Salah satu upayanya dengan menggelar sarasehan bagi para pelaku UMKM di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA).

Ketua Lembaga Pengembang UMKM PDM Kota Yogyakarta, Sigit Marno Nugroho menuturkan sarasehan rutin diselenggarakan tiap bulan. Sarasehan ini menjadi wadah untuk memajukan UMKM dengan menghadirkan inovasi-inovasi baru, baik dari segi pemasaran maupun kualitas produk. Sehingga berdampak pada peningkatan jangkauan usaha dan membawa berbagai implikasi positif terhadap pendapatan UMKM serta perkonomian daerah.

"Sarasehan ini juga sebagai ajang silaturahmi, menambah ilmu bisnis, memberi motivasi dan informasi peluang bisnis," kata Sigit Marno di sela acara sarasehan, Rabu (13/11).

Drs H Herry Zudianto SE Akt MM, se-

lalu pemateri berpesan kepada para pelaku UMKM di lingkungan PCM dan PCA Jetis untuk selalu jujur, menjaga kualitas produk dan menjaga kepuasan konsumen. Tak kalah penting adalah mengatur keuangan. "Pisahkan uang pribadi dengan usaha sekecil dan sebesar apapun level bisnisnya," kata Herry Zudianto yang juga berpesan kepada pelaku UMKM untuk membuat produk yang unik.

Wakil Ketua PDM Kota Yogyakarta, Muhammad Iqbal SE berpesan agar pelaku UMKM harus yakin dengan produknya sendiri. Kemudian selalu meningkatkan kualitas produk dan selalu menambah keterampilan pemasaran. "Dengan berkembangnya sektor UMKM maka akan mendorong perekonomian masyarakat," katanya.

Para pelaku UMKM peserta sarasehan sangat menyambut baik digelar sarasehan ini. Mereka merasakan mendapatkan banyak pengetahuan baru untuk lebih berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pemasaran. (Dev)-f

BERI KEMUDAHAN LAYANAN MASYARAKAT

RS Jogja Luncurkan Aplikasi Berbasis Mobile

YOGYA (KR) - RSUD Kota Yogya atau RS Jogja meluncurkan aplikasi berbasis mobile yang bisa diunduh melalui smartphone android. Langkah digitalisasi itu sekaligus memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang hendak mengakses kebutuhan medis.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, mengapresiasi segala hal yang berkaitan dengan kemudahan layanan. Apalagi melalui layanan mobile tidak hanya untuk akses di RS Jogja tetapi juga pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PDDP). "Peluncuran aplikasi android RS Jogja Mobile dari RSUD Kota Yogya itu tentu untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan kemudahan layanan. Kami harus apresiasi itu," tandasnya, Rabu (13/11).

Menurutnya RS Jogja mobile dengan layanan berbasis Personal Health Record memberikan kemudahan akses layanan dimana pun dan kapan pun. Pelayanan meliputi reservasi klinik, riwayat layanan kesehatan pribadi, informasi layanan RS

Jogja, jadwal dokter, serta layanan antar obat 'Otwewe Masjo'. "Pemkot Yogya terus berkomitmen untuk mengupayakan peningkatan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari bersama-sama bergerak menuju Kota Yogya yang sehat, produktif dan sejahtera," imbuhnya.

Sementara itu Direktur RS Jogja Ariyudi Yunita, mengatakan aplikasi RS Jogja Mobile berbasis android bisa didownload di Playstore. Aplikasi itu untuk Personal Health Record pasien maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan RS Jogja. Selain reservasi klinik, aplikasi RS Jogja Mobile juga bisa melihat antrian klinik dan antrian laboratorium. "Masyarakat bisa melihat personal kesehatannya bagaimana di aplikasi. Kemudahan untuk masyarakat dalam mengakses RS Jogja," terangnya.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, menyampaikan peluncuran layanan Pendaftaran Jaminan Kesehatan (Jaga Sultan) dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap layanan JKN.

Jaga Sultan melayani pendaftaran JKN yang pembayarannya iurnya ditanggung Pemkot Yogya melalui program PDDP. Layanan Jaga Sultan bisa diakses di menu Jamkes pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS). "Dengan Jaga Sultan ini masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kesehatan. Tapi cukup dengan androidnya sudah bisa menggunakan atau memanfaatkannya. Jadi ini memang khususnya untuk PDDP. Semua penduduk kota yang belum mempunyai jaminan kesehatan asal mau di kelas tiga, bisa mengakses atau mendaftarkan. Asal penduduk KTP Yogya, belum mempunyai jaminan apapun, atau mempunyai JKN tapi sudah nunggak," paparnya.

Dirinya menegaskan Pemkot Yogya sudah mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) JKN. Dengan capaian UHC JKN itu berarti Pemkot sudah bisa memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar JKN, Pemkot mengatasinya dengan program PDDP. (Dhi)-f

WAKTU TERBATAS, DPRD KOTA YOGYA CARI UPAYA

FUI DIY Desak Penuntasan Raperda Miras

YOGYA (KR) - Elemen masyarakat dari Forum Ukuhawah Islamiyah (FUI) DIY mendatangi gedung DPRD Kota Yogya, Rabu (13/11). Kehadiran ratusan warga itu sebagai dukungan sekaligus mendesak agar raperda terkait minuman keras (miras) dapat segera dituntaskan.

Pt Sekjen FUI DIY MAkhid Subianto, mendukung penuh langkah dewan dalam menyusun raperda miras yang belum terealisasi. Setelah mendapatkan penjelasan dari jajaran anggota DPRD Kota Yogya, pihaknya juga bisa memahami jika proses pembahasan tidak berhenti melainkan ada berbagai kendala yang menyebabkan proses tidak berjalan sesuai rencana. "Alhamdulillah kalau perda terkait miras bisa selesai tahun ini. Tapi kalau tidak, tadi sudah ada komitmen di triwulan pertama tahun depan bisa dibuat raperda menjadi perda," terangnya usai menjalani audiensi.

Pada kesempatan itu, FUI DIY ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Triyono Hari Kuncoro, Ketua Bapempera Ipung Purwandari, dan Wakil Ketua Bapempera Tri Waluko Widodo. Sesuai Propempera 2024, raperda

terkait miras yang menjadi pemutakhiran dari Perda 4/1957 seharusnya bisa diselesaikan pada tahun ini. Akan tetapi seiring dinamika pergantian anggota dewan serta pembentukan alat kelengkapan, produk hukum yang sudah menjadi target pembahasan belum juga bisa dibentuk pansus.

Akhid mengaku persoalan miras sangat mendesak, mengingat banyaknya laporan terkait dampak negatif dari peredaran miras di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan terus memantau perkembangan proses penyusunan regulasi terkait pengendalian miras serta melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait. "Ini termasuk kepercayaan pada pimpinan dewan, apakah secara serius akan ditindaklanjuti atau tidak. Masyarakat yang akan menilai," tandasnya.

Sementara Tri Waluko Widodo, menyebut kendala utama adalah keterbatasan waktu yang semakin mendesak. Apalagi alat kelengkapan dewan baru terbentuk awal November. Sedangkan merujuk pada aturan perundangan serta surat dari provinsi yang meminta fasilitasi raperda paling lambat 29 November, ma-

ka kemungkinan terbahas akan semakin tipis. Hal ini karena belum ada pansus yang dibentuk serta tahapan panjuragan dalam proses pembahasan raperda bisa memiliki legalitas.

Kendati begitu, jajarannya tetap akan berupaya keras untuk membahas. Pasalnya masih ada celah untuk mem-

perpanjang jangka waktu fasilitasi raperda sesuai dengan Permendagri. "Permendagri itu khusus untuk peraturan-peraturan tertentu. Jadi, kita masih akan mengkaji apakah raperda miras ini bisa dikategorikan sebagai peraturan khusus, sehingga bisa mendapatkan perpanjangan waktu," katanya.

(Dhi)-f

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th. 1996 PT. Bank Perkreditan Rakyat Kartikaertha Kencanajaya akan melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta atas barang jaminan berupa tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Sebidang tanah & bangunan SHM No.02181 an.Muginem LT 210 m2, Lelang : Ds.Kel. Sthargo, Kec. Imogiri, Kabupaten Bantul.
- Harga Limit : Rp.225.000.000 (Dua ratus Dua puluh Lima Juta Rupiah)
- Uang Jaminan : Rp.22.500.000 (Dua puluh Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah)

Pelaksanaan Lelang Eksekusi diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 November 2024
Batas Akhir Penawaran : 28 November 2024, Pukul 10.00 (sesuai waktu server)
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
Jl. Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Syarat-Syarat Lelang

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (Email) yang diakses pada sistem Domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id dengan penawaran terbuka (open bidding) tata cara mengikuti lelang Email dapat dilihat pada menu tata cara dan penggunaan pada domain tersebut.
- Talangan peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dan meremak serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri.
- Uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor virtual (VA) masing-masing peserta.
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Semua barang yang akan dijual DALAM KONDISI APAADANYA, kami menganjurkan peserta untuk memeriksa obyek lelang sebelum mengikuti lelang karena satu hal pihak penjual atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan / penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berketerampilan / peminat tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan Kantor Pusat DJKN.
- Peserta dapat melihat obyek lelang sebelum pelaksanaan lelang, Informasi lebih lanjut hubungi PT. Bank Perkreditan Rakyat Kartikaertha Kencanajaya di Jl. Raya Godean KM 4, Ruko Tambak Mas Blok AB No. 14-15 Yogyakarta, Telp. 0858 6871 3344

Yogyakarta, 14 November 2024
PT. BPR Kartikaertha Kencanajaya
Ttd
B. Nurhaji Agung

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI
JALAN. K.H. AGUS SALIM NO. 170B, LEDOKSARI, KEPEK, WONOSARI, GUNUNGKIDUL 55813
TELEPON (0274) 394798, 394796; FAKSIMILE (0274) 393185; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI PAJAK
NOMOR : PENG-02/KPP.2303/2024

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum/lelang eksekusi/sitaan dengan penawaran melalui Aplikasi Lelang Melalui Internet tanpa kehadiran peserta atas barang sitaan milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak : Suratman (NPWP:24.397.087.8-541.000) sebagai berikut :

Obyek Lelang	Keterangan
<ul style="list-style-type: none">3 bidang tanah dijual 1 paket berikut segala sesuatu diatasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:<ul style="list-style-type: none">00389 Wukirsari, Baleharjo, Wonosari Luas : 248 m2 a.n. Suratman02261 Wukirsari, Baleharjo, Wonosari Luas : 160 m2 a.n. Suratman02142 Wukirsari, Baleharjo, Wonosari Luas : 319 m2 a.n. SuratmanTotal luas tanah : 727 m2, terletak di Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Kab. GunungkidulSertifikat hak atas tanah tidak dikuasai.Nilai Limit Rp 6.028.693.000,-Uang Jaminan Rp 1.205.738.000,-	<ul style="list-style-type: none">Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (core system PT BRI (Pesero) end off day pukul 21.59 WIB).Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang

Persyaratan lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id atau portal.lelang.go.id
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
- Obyek lelang dapat dilihat di lokasi mulai saat pengumuman lelang setiap hari di alamat : Dsn Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Kab. Gunungkidul.
- Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi seksi Penagihan KPP Pratama Wonosari telp. (0274) 394796, 394798 pada jam kerja atau KPKNL Yogyakarta telp. (0274) 544091.

Pelaksanaan Lelang :
Cara Penawaran : Closed Bidding (dengan mengakses melalui alamat domain lelang.go.id atau portal.lelang.go.id
Hari : Kamis
Tanggal : 28 November 2024
Batas Akhir Penawaran : 11.15 Waktu Server Aplikasi (sesuai WIB)
Alamat Domain : lelang.go.id atau portal.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta
Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
Bea lelang Pembeli : 2% dari harga lelang

Wonosari, 14 November 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari
TTD
Agung Subchan Kurnianto